

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Pabedilan telah menunjukkan dampak positif bagi kebutuhan gizi siswa di sekolah, meringankan beban ekonomi keluarga siswa menengah ke bawah, dan mendukung energi siswa saat belajar. Namun, program ini belum sepenuhnya sesuai dengan standar dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Terdapat kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku dan kenyataan di lapangan, yang terlihat dari tiga indikator. Pertama, distribusi makanan dari Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) ke sekolah sering terlambat, mengganggu waktu belajar dan istirahat siswa. Kedua, porsi makanan yang diberikan belum memenuhi kebutuhan gizi siswa SMP yang sedang tumbuh. Ketiga, koordinasi antara SPPG, sekolah, dan pemerintah daerah dalam pengawasan program belum optimal. Pemerintah daerah sebagai mitra pelaksana belum menjalankan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dari perspektif Hukum Tata Negara Islam, program ini memiliki legitimasi syar'i yang kuat, namun pelaksanaannya yang tidak optimal bertentangan dengan nilai-nilai kemaslahatan kebijakan.
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak positif pada konsentrasi belajar siswa di Kecamatan Pabedilan, meskipun belum optimal dan merata. Berdasarkan pengamatan guru dan siswa, ada perubahan perilaku belajar, seperti peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran, mengurangi keracunan pada jam awal pelajaran, dan lebih responsif terhadap pertanyaan guru. Program ini membantu siswa yang kurang makan dengan asupan gizi yang cukup untuk belajar. Namun, konsentrasi belajar juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, lingkungan belajar, metode pengajaran, dan dukungan keluarga, sehingga MBG perlu dilihat sebagai bagian dari solusi yang lebih luas.
3. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Pabedilan dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat yang saling berkaitan. Faktor pendukung utama meliputi: adanya komitmen yang kuat dari pemerintah pusat yang diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 sebagai landasan hukum yang resmi dan mengikat; keterlibatan aktif kepala sekolah dan guru dalam mengoordinasikan pelaksanaan program di lingkungan sekolah; serta antusiasme dan penerimaan positif dari siswa sebagai penerima manfaat langsung yang turut mendorong keberhasilan program di tingkat mikro. Di sisi lain, faktor penghambat yang ditemukan meliputi: ketidakfleksibelan jadwal distribusi makanan dari SPPG yang menyebabkan keterlambatan dan berdampak pada gangguan waktu belajar siswa; keterbatasan variasi menu dan standar porsi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan gizi berdasarkan

kelompok usia dan jenjang pendidikan; serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi pelaksana di tingkat lokal, khususnya antara SPPG, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan pihak sekolah. Keberhasilan program dalam jangka panjang sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk secara konsisten memaksimalkan faktor pendukung sekaligus merancang strategi yang sistematis dalam mengatasi berbagai hambatan yang ada, sehingga tujuan peningkatan gizi dan konsentrasi belajar siswa sebagaimana diamanatkan Perpres Nomor 83 Tahun 2024 dapat tercapai secara lebih efektif dan merata.

B. Saran

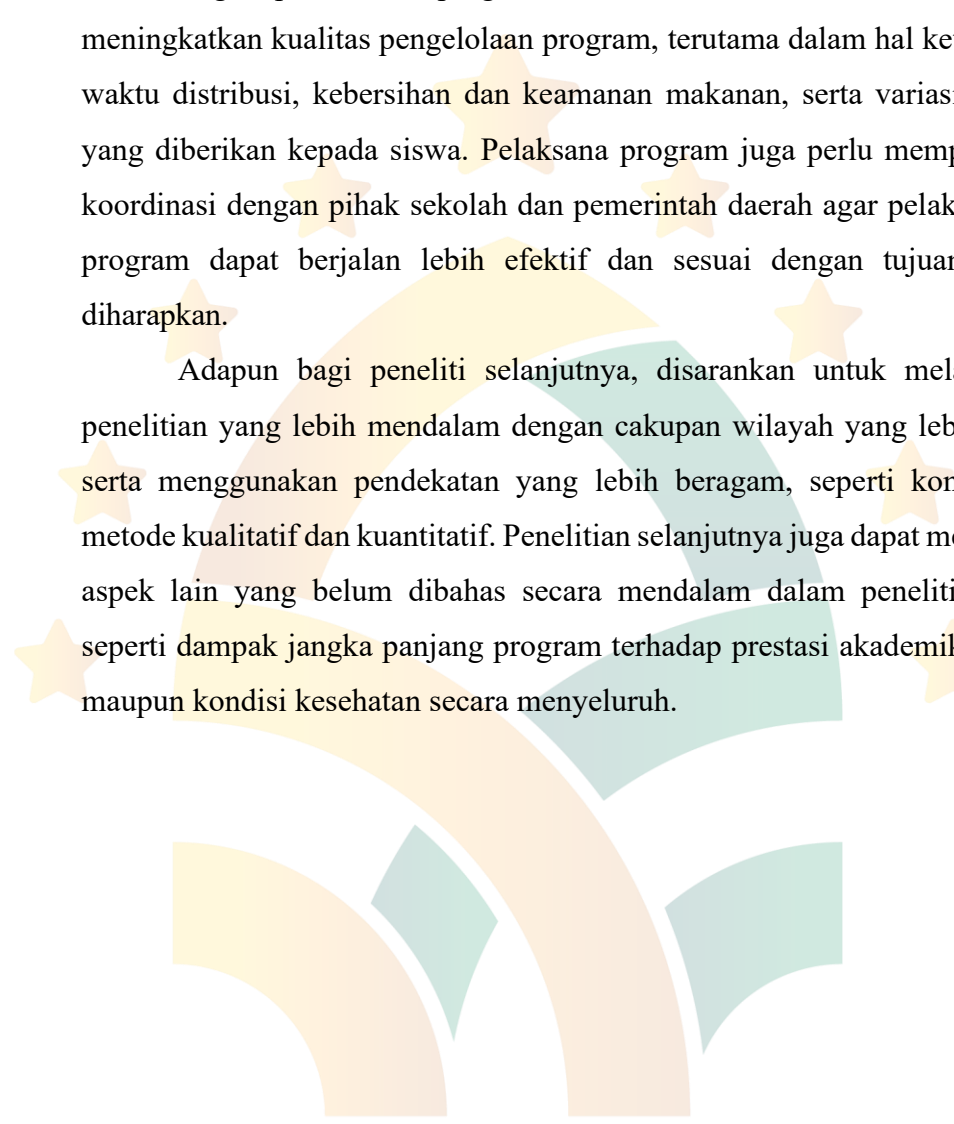
Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak adalah sebagai berikut. Bagi pemerintah pusat, diharapkan dapat memperkuat kebijakan Program Makan Bergizi Gratis melalui penyusunan regulasi yang lebih teknis dan operasional, khususnya terkait standar gizi, variasi menu, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai agar pelaksanaan program dapat berjalan secara konsisten dan merata di seluruh daerah.

Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan peran dalam koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program di tingkat lokal, termasuk memastikan distribusi makanan berjalan tepat waktu serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti penyedia bahan pangan lokal, guna mendukung keberlanjutan program sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

Bagi pihak sekolah, diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan program dengan cara meningkatkan pengawasan terhadap proses pembagian makanan serta memastikan seluruh siswa menerima manfaat program secara merata. Sekolah juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan masukan terkait pelaksanaan program, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan siswa, jadwal distribusi, serta kondisi di lapangan.

Bagi pelaksana program atau SPPG, disarankan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan program, terutama dalam hal ketepatan waktu distribusi, kebersihan dan keamanan makanan, serta variasi menu yang diberikan kepada siswa. Pelaksana program juga perlu memperkuat koordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah daerah agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Adapun bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menggunakan pendekatan yang lebih beragam, seperti kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji aspek lain yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian ini, seperti dampak jangka panjang program terhadap prestasi akademik siswa maupun kondisi kesehatan secara menyeluruh.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON